

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT PELAKSANAAN JASA SEKTOR PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI,
TERTANGGAL 13 APRIL 2013)**

TESIS

Oleh:

**SALASATUN KURNIYATI
2002190106**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI
TERKAIT PELAKSANAAN JASA SEKTOR PERBANKAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI,
TERTANGGAL 13 APRIL 2013)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum
(M. H.) Pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Kristen Indonesia

Oleh:

**SALASATUN KURNIYATI
2002190106**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2023**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan;

Nama : Salasatun Kurniyati

NIM : 2002190106

Program Studi : Magister Hukum

Fakultas : Program Pascasarjana

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Jasa Sektor Perbankan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Tpk/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013)”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di Universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 16 November 2023



Salasatun Kurniyati



**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA**

HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Jasa Sektor
Perbankan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Tpk/2013/PT.DKI,
Tertanggal 13 April 2013)**

Oleh :

Nama : Salasatun Kurniyati
NIM : 2002190106
Program Studi : Magister Hukum
Peminatan : Hukum Bisnis

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 16 November 2023
Menyetujui,

Pembimbing I

Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.
NIDN. 0326106005

Pembimbing II

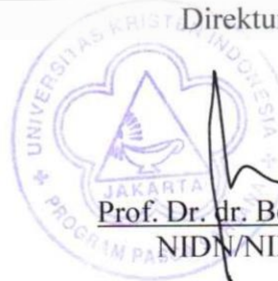
Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H.
NIDN. 0318106803

Ketua Program Studi Magister Hukum



Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIDN/NIDK: 141104/ 0327096504

Direktur Program Pascasarjana



Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M. Pd., PA
NIDN/NIDK: 001473/0320116402






UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCASARJANA

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Pada tanggal 16 November 2023 telah diselenggarakan Sidang Tesis untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Salasatun Kurniyati
NIM : 2002190106
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Jasa Sektor Perbankan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Tpk/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013**" oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA..	Sebagai Ketua	
2. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H..	Sebagai Anggota	
3. Dr. Diana Napitupulu S.H., M.H., M.Kn., M.Sc	Sebagai Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PROGRAM PASCASARJANA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Salasatun Kurniyati
NIM : 2002190106
Program Studi : Magister Hukum
Fakultas : Program Pascasarjana
Jenis Tugas Akhir : Tesis
Judul : **"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terkait Pelaksanaan Jasa Sektor Perbankan (Studi Putusan Nomor: 09/Pid/Tpk/2013/PT.DKI, tertanggal 13 April 2013)"**

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Non Eksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Dibuat di Jakarta, 16 November 2023



METERAI TEMPEL
EBAAX774724982

Salasatun Kurniyati

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya kepada peneliti sehingga peneliti mampu menyelesaikan tesis ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan”.

Peneliti menyadari tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Peneliti menyadari tesis ini dapat selesai karena bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Dengan demikian, peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A., Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) beserta jajaran pimpinan dan staf UKI sebagai tempat peneliti mengikuti pendidikan pascasarjana magister hukum.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, Direktur program pascasarjana magister hukum UKI.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., Kepala Program Studi Magister Hukum UKI.
4. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., M.B.A. pembimbing pertama.
5. Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H. selaku pembimbing kedua.
6. Keluarga tersayang, suami, puteri tercinta dan teman-teman yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan serta senantiasa mendampingi dalam masa sulit dan bahagia.
7. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Hukum yang sudah menjadi mitra diskusi.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT membalas kebaikan seluruh pihak yang sudah membantu peneliti. Semoga tesis ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa.

Jakarta, 16 November 2023

Salasatun Kurniyati

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN . PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1. Maksud Penelitian	7
2. Tujuan Penelitian	7
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Lokasi Penelitian	9
4. Data Penelitian	10
5. Tahapan Penelitian	11
6. Metode Analisis	12
7. Sistematika Penulisan	12

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	14
	A. Kerangka Teoritis.....	14
	B. Kerangka Konsep.....	16
	1. Definisi-definisi.....	16
	2. Tindak Pidana.....	16
	3. Tindak Pidana Korupsi.....	18
	4. Perbankan.....	28
	5. Tindak Pidana Perbankan.....	43
BAB III	TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR PERBANKAN PADA KASUS PUTUSAN NOMOR : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	44
	A. Pengertian Tindak Pidana Perbankan Berdasarkan Undang-Undang.....	44
	B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	47
	C. Tindak Pidana Korupsi Sektor Perbankan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	58
	D. Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan Pada Kasus Putusan Nomor : 09/Pid/TPK/2013/PT.DKI.....	65
BAB IV	AKIBAT HUKUM DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA SEKTOR PERBANKAN DIKAITKAN DENGAN KASUS PUTUSAN NOMOR : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI.....	68
	A. Akibat Hukum Dan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan Dilihat Dari Kasus Putusan Nomor:09/PID/TPK/2013/PT.DKI.....	68
	B. Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Sektor Perbankan.....	74

BAB V	PENUTUP	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Saran	84
	DAFTAR PUSTAKA	85



ABSTRAK

Tindak pidana korupsi dapat terjadi di banyak sektor salah satunya sektor perbankan. Pada korupsi di sektor perbankan perlu adanya perhatian serius mengingat sektor perbankan mempunyai peranan sebagai upaya memperkuat dan memperbaiki perekonomian nasional. Hal ini terjadi karena sektor perbankan memegang peranan penting sebagai lembaga keuangan yang menjadi cermin perkembangan ekonomi suatu negara. Peran sektor perbankan dalam skala nasional harus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya yang melibatkan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan sektor riil.

Sektor perbankan sebagai lembaga intermediasi mempunyai peranan penting dalam mendukung perekonomian nasional, khususnya dalam menyediakan dana melalui pemberian kredit kepada masyarakat untuk mendukung usaha. Dengan demikian, bank menjadi salah satu pilar utama dalam perekonomian negara, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan merupakan komponen integral dalam sistem keuangan dan pembayaran negara.

Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur terkait dengan tindak pidana korupsi, hal ini dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan suatu hukum yang diatur secara khusus. Pada hubungan antara tindak pidana korupsi dengan sektor perbankan dapat terjadi ketika proses pemberian kredit yang sering terjadi tindak pidana, ketika ada oknum yang melihat celah supaya memperoleh keuntungan dengan cara melanggar hukum.

Penyimpangan pada proses pemberian kredit bisa menjadi tindak pidana perbankan, seperti yang terjadi pada Putusan No : 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, yang diumumkan pada tanggal 13 April 2013. Dalam putusan tersebut, hakim Pengadilan Tinggi mengemukakan bahwa Athouf Ibnu Tama sudah terbukti dengan bukti yang sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Demikian pula, Banu Anwari, yang merupakan nasabah atau debitur, juga dihadapkan pada tindak pidana korupsi melalui Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst yang diumumkan pada tertanggal 26 Desember 2012, yang menyatakan bahwa Banu Anwari sudah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan, Perbankan

ABSTRACT

Corruption can occur in various sectors, including the banking sector. Regarding corruption in the banking sector, serious attention is needed, considering that the banking sector has a role as an effort to improve and strengthen the national economy. This is because the banking sector has a strategic position as a financial institution which is an indicator of the progress and decline of a country's economy. The role of the national banking sector must be increased according to its function, both to collect funds from the public and channel funds to the public to finance real sector activities.

The banking sector, functioning as an intermediary institution, holds a crucial role in bolstering the nation's economy, particularly by extending bank credit to facilitate various community business ventures. Therefore, banks constitute one of the fundamental elements of a nation's economy, aimed at enhancing the well-being of its citizens and forming an essential component of the country's financial and payment infrastructure.

Law Number 10 of 1998 concerning Banking does not regulate corruption, this is because corruption is a law that is specifically regulated. In the relationship between criminal acts of corruption and the banking sector, it can occur in the provision of credit where criminal acts often occur, where irresponsible parties take advantage of loopholes to gain profits unlawfully.

The form of irregularities in the provision of credit can become a banking crime that occurs in Decision Number: 09/PID/TPK/2013/PT.DKI, dated April 13 2013, the High Court judge stated that the defendant Athouf Ibnu Tama had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime corruption based on Article 2 paragraph (1) Jo. Article 18 Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 Jo. Article 55 paragraph (1) 1st of the Criminal Code. Banu Anwari as a customer (debtor) was also charged with criminal acts of corruption through the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst dated 26 December 2012, stating that the defendant Banu Anwari had been legally and convincingly proven guilty of committing a crime of corruption.

Keywords: Criminal Acts, Corruption Crimes, Banking Crimes, Banking